



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia- NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu kewajiban perangkat daerah di Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja pada Unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja Utama yang telah telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Sasaran Kinerja yang selaras dengan dokumen RENSTRA BPKAD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Pekanbaru, 4 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, SE, M.Si, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Landasan Hukum	1
1.1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi	9
1.5. Permasalahan Utama Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. CAPAIAN KINERJA	17
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	18
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	24
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	28
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan	31
3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	35
3.1. REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan Umum	50
4.2. Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022, merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas Penggunaan Anggaran. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja dipaparkan pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.

1.1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61).

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan LkjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di Tahun mendatang.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Koordinator Perencanaan Program;
2. Sub Koordinator Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
3. Sub Koordinator Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah;
2. Subbidang Belanja Daerah;
3. Sub Koordinator Pengelola Kas Daerah.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

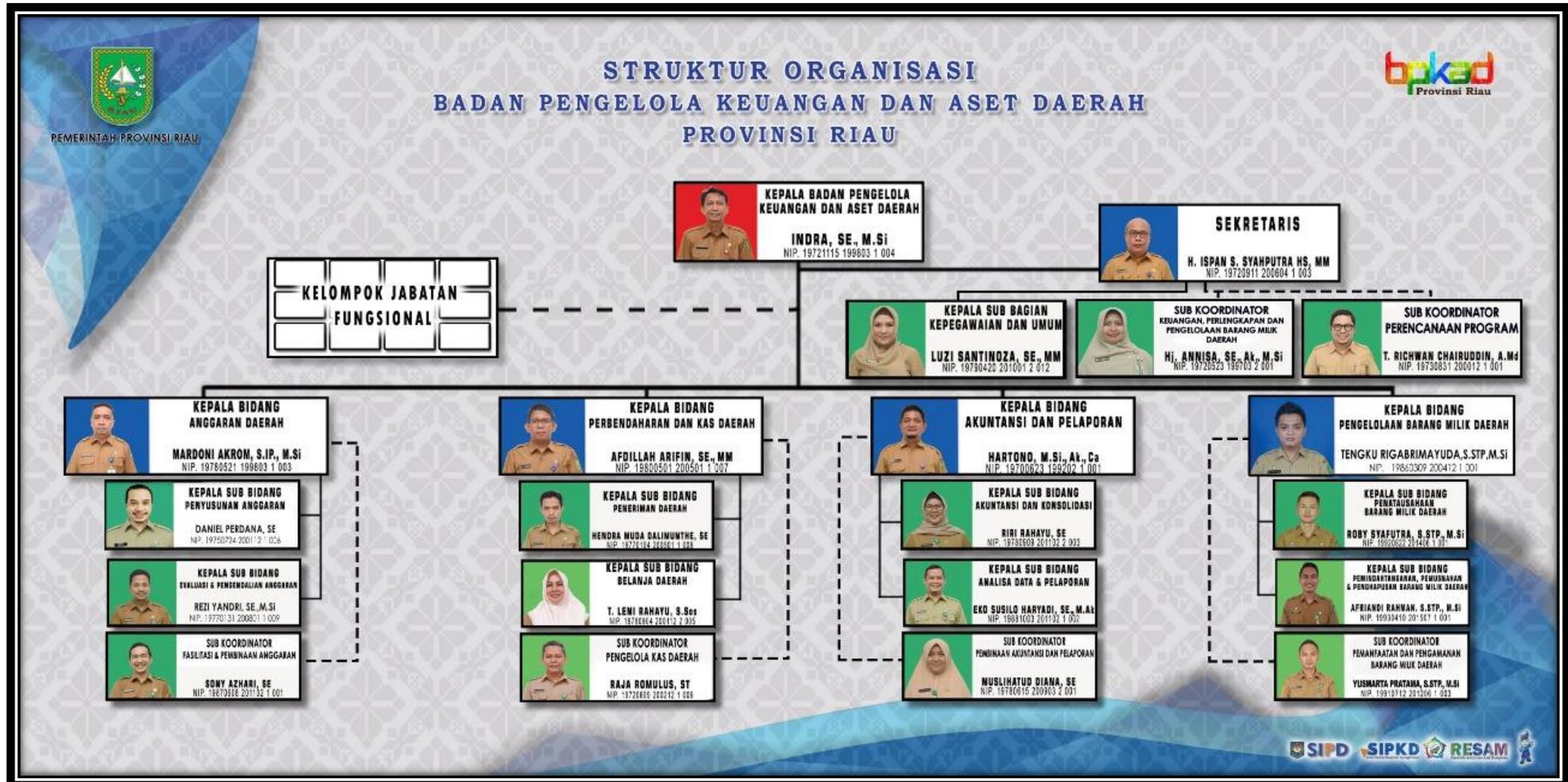
1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
3. Sub Koordinator Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 berjumlah 132 ASN, berikut komposisi ASN berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Struktural dan Fungsional :

Tabel 1.1
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan

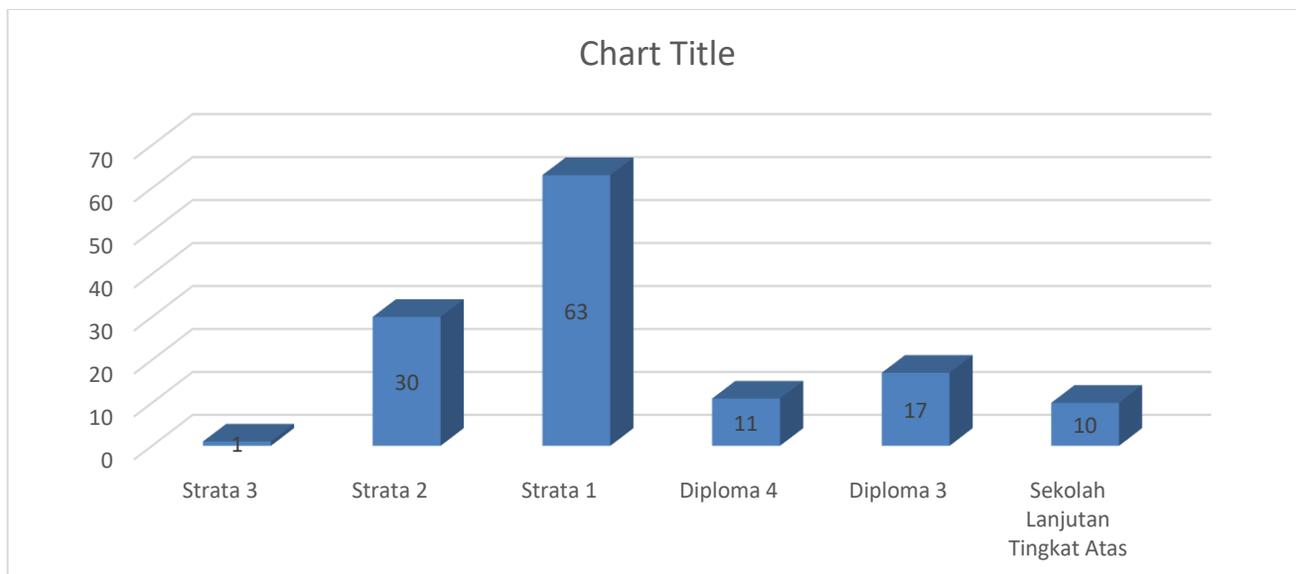
No	PENDIDIKAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki - laki	Perempuan	
1.	Strata 3	0	1	1
2.	Strata 2	19	11	30
3.	Strata 1	30	33	63
4.	Diploma 4	10	1	11
5.	Diploma 3	3	14	17
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	6	4	10
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	0	0
8.	Sekolah Dasar	0	0	0
J U M L A H		68	64	132

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022

Berdasarkan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat 132 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan Strata 3 dengan jumlah 1 orang, Strata 2 dengan Jumlah 30 Orang dan Strata 1 dengan Jumlah 63 Orang, Diploma 4 dengan jumlah 11 orang, Diploma 3 dengan jumlah 17 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan jumlah 10 orang.

ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 122 Orang dengan Persentase 91,80 dan 10 Orang yang berpendidikan SLTA dengan Persentase 8,20. Sesuai data di atas dapat disimpulkan rata-rata ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah berpendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Aparatur BPKAD baik selaku OPD maupun selaku PPKD/BUD. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 104 Orang, diikuti Golongan II dengan jumlah 15 Orang dan Golongan IV 13 Orang.

Tabel 1.2
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	10	3	13
2.	Golongan III	53	51	104
3.	Golongan II	5	10	15
4.	Golongan I	0	0	0
J U M L A H		68	64	132

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon

Tabel 1.3
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan
Jabatan Struktural Dan Fungsional

No	JABATAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total (Orang)
1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	-	1
2.	ADMINISTRATOR	5	-	5
3.	PENGAWAS	6	3	9
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	7	3	10
J U M L A H		20	7	27

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2022

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Peran BPKAD sebagai PPKD/BUD dan Pengelola BMD, memiliki peran strategis sebagai penunjang terwujudnya sasaran Gubernur dalam pencapaian target penyerapan Anggaran, Akuntabilitas Pengelola Keuangan BMD, serta Pencapaian target Kinerja Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu BPKAD memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada OPD sehingga Pengelola Keuangan dan BMD dapat terlaksana dengan Akuntabel dan Transparan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah, BPKAD menjalankan tugas Pembinaan Pengelola Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pelaksanaan tugas dimaksud, dilaksanakan melalui evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Pelayanan Konsultasi dan lain sebagainya.

1.5 Permasalahan Utama Organisasi (*Strategis Issued*)

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian Target Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari Permasalahan-Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrua
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
		Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamankan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai. Pemanfaatan dan pengamanan BMD belum Optimal	Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Belum adanya Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD Provinsi Riau	Keterbatasan SDM yang memahami tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Sumber : Renstra 2019 – 2024

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir perioder Renstra yaitu pada tahun 2024.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- e) Tidak seimbangny rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 Tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana Strategis tersebut memuat Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

TUJUAN

“Meningkatkan Kualitas tata kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”

SASARAN STRATEGIS

- 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.**
- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kab/Kota**

Untuk Indikator Kinerja tujuan telah ditetapkan yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Indikator Kinerja:

- a) Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau
- b) Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD
- b) Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD
- c) Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau
- d) Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan
- e) Persentase SPM yang diterbitkan SP2D
- f) Rata-rata waktu pemrosesan SPM
- g) Rasio likuiditas Pemprov Riau
- h) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI
- i) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j) Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu
- k) Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan
- l) Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses
- m) Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses
- n) Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi
- o) Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah.

2. Meningkatnya Kualitas Tata kelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota.

Indikator Kinerja:

- a) Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
- b) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD
- c) Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
- d) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- ✓ Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✓ Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- ✓ Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- ✓ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2022 yang berisi 20 (dua puluh) indikator kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2022. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 865/XII/2014, dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai.

Rincian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu
2	Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%
3	Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%
4	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu
5	Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi
6	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%
7	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari
8	Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%
9	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu
10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
11	Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%
12	Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	30 persil
13	Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	87%
14	Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses	13 Usulan
15	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	13,68%
16	Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%
17	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%
18	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%
19	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota
20	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%

Untuk mewujudkan kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 31.728.307.397,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 2.119.257.990.258,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2.093.181.304,00
TOTAL		Rp. 2.153.079.478.959,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu Tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dan telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 serta perbandingannya dengan pencapaian Tahun sebelumnya.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sampai dengan akhir Tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada bagian ini akan dijabarkan capaian Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Ada 2 sasaran yang Indikator tujuan BPKAD Provinsi Riau, Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 16 (Enam belas) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
2	Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,05%	125,2 %
3	Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	14,21 %	142,1 %
4	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
5	Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	8 Dokumen Regulasi	400 %
6	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%
7	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
8	Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100%	100%
9	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
11	Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %
12	Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	30 persil	68 Persil	226 %

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
13	Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	87%	100%	100%
14	Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses	13 Usulan	14 Usulan	107%
15	bangunan yang telah diinventarisasi Persentase aset tanah, gedung serta	13,68%	12,34%	90,20 %
16	Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%
Rata-rata capaian (%)				130,66%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas adalah 130,66%. Pencapaian rata-rata indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya pencapaian/ realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Aset Daerah. Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 16 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.2. sesuai data capaian kinerja diatas masih ada beberapa indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Dan disamping itu terdapat Pencapaian Kinerja yang diatas 100 persen terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 16 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau sebesar 100%, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Ranperda RAPBD ke DPRD pada Tanggal 10 November 2022, hal ini telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Capaian Indikator Kinerja Anggaran Urusan Pendidikan yang terakomodir APBD terealisasi sebesar 125,2 %. Dari 20 % Target yang ditetapkan dan terealisasi sebesar 25,05 %. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Belanja Daerah. Capaian ini sudah menunjukkan hasil yang baik, Jika dilihat dari target akhir periode Renstra telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 20%.
3. Capaian Indikator Kinerja Anggaran Urusan Kesehatan yang terakomodir APBD terealisasi sebesar 142,10 %. Dari 10% target yang ditetapkan dan terealisasi sebesar 14,21 %. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan Anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji. Capaian ini lebih baik jika dilihat dari target akhir periode Renstra telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Sebesar 100%, Berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022 Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat akhir Desember (31 Desember). Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2023 pada tanggal 16 Desember 2022.
5. Jumlah Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun Capaian Indikator Kinerja Jumlah paket regulasi mengenai keuangan Provinsi Riau yang tersusun sebanyak 8 Regulasi dari 2 Regulasi yang ditargetkan, berarti capaian indikator kinerjanya sebesar 400%. Regulasi yang telah disusun adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- c. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Analisa Standar Belanja.
 - e. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.
 - f. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
 - g. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2022 Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
 - h. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.
6. Capaian Kinerja Persentase SPM yang diterbitkan SP2D adalah 100 % dengan jumlah SP2D yang diterbitkan selama tahun 2022 sebanyak 15.173 SP2D.
 7. Capaian Indikator Kinerja Rata – rata waktu pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling 2 (Dua) Hari sejak Tanggal Diterimanya SPM. Berkenaan Dengan waktu dua Hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra yaitu 2 hari.
 8. Capaian Indikator Kinerja Rasio Likuiditas Pemprov Riau adalah sebesar 100%. Jumlah realisasi anggaran yang dapat dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.102.477.739.152,38
 9. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI adalah sesuai dengan target yang telah ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja yaitu tepat waktu dengan capaian 100%, LKPD disampaikan oleh Pemerintah

Provinsi Riau ke BPK-RI Perwakilan Riau pada Tanggal 3 Maret 2022 dan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2016 yaitu LKPD disampaikan 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra yaitu tepat waktu.

10. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah 100 % yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini sama dengan Tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan capaian target akhir periode Renstra.
11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Entitas Akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu adalah sebesar 100 % dengan realisasi 38 OPD yang tepat waktu dari 38 OPD di Provinsi Riau. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan OPD ke BPKAD.
12. Capaian Indikator Kinerja jumlah persil tanah Pemprov Riau yang disertifikatkan adalah 226%. Dari 30 Persil Tanah yang ditargetkan untuk disertifikatkan terealisasi sebanyak 68 Persil.
13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses adalah sebesar 117%. Target Usulan Pemanfaatan Aset Tetap pada Tahun 2022 yaitu 85 % dari Usulan, sedangkan yang telah direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2022 juga sebanyak 100%.
14. Capaian Indikator Kinerja Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses adalah sebesar 200% dari 12 usulan yang ditargetkan terealisasi sebanyak 24 usulan.
15. Capaian Indikator Kinerja bangunan yang telah diinventarisasi Persentase aset tanah, gedung serta sebesar 90,20% dengan Realisasi 12,34% dengan rincian yaitu dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, terdapat 563 Aset Tanah dan 558 Aset Gedung yang sudah diinventarisasi.
16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah sebesar 100 % dengan realisasi 33 OPD yang mengusulkan RKBMD dari 33 OPD di Provinsi Riau. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian RKBMD ke pengelola Aset Provinsi Riau.

Tujuan sasaran yang kedua adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 4 (Empat) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
17	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100 %
18	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	98,50%	107,4%
19	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%
20	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%
Rata-rata capaian (%)				101.85%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.1.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka Peningkatan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau dalah 101,85 %. Pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori amat baik.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam table 3.2 diatas tidak ada indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%.

Rincian pencapaian dari 4 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Ranperda Kabupaten/Kota sebesar 100 %. Capaian ini diperoleh dari 12 Dokumen Ranperda APBD Perubahan T.A 2022 Kabupaten/Kota dan 12 Dokumen Ranperda APBD T.A 2022 yang ditargetkan untuk dievaluasi, terdapat 11

Ranperda APBD Perubahan T.A 2022 Kabupaten/Kota yang sudah dievaluasi. dan 12 Ranperda APBD T.A 2022.

2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD T.A 2022 Kabupaten/Kota sebesar 107% dengan Realisasi 98.33% dengan Target 91.66%. Capaian ini diperoleh dari 240 rekomendasi evaluasi yang di tindaklanjuti adalah 236 rekomendasi evaluasi.
3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2020 Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebesar 100 %. Dengan realisasi 12 Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2020 Kabupaten/Kota yang sudah dievaluasi selama Tahun 2022.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2021 Kabupaten/Kota sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Capaian kinerja pada Tahun 2021 dengan rata – rata sebesar 118,87% dari 20 Indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2021 ada 14 Indikator Kinerja capaiannya 100%, dan ada 5 Indikator Kinerja yang melebihi Target Kinerja 100% serta ada 1 Indikator Kinerja yang Capaiannya Kurang dari 100%. Sedangkan Capaian Kinerja 2022 adalah sebesar 124.89% ada 13 Indikator Kinerja yang Capaiannya 100% dan 6 Indikator Kinerja yang melebihi 100% dan hanya 1 Indikator Kinerja yang capaian kurang dari 100%. Secara akumulasi Capaian Kinerja 2022 telah menunjukkan peningkatan dari tahun 2021. Hanya 1 Indikator Kinerja yang tidak mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,74%	129 %	20%	25,05%	125,2 %
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	16,68 %	166 %	10%	14,21 %	142,1 %
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	4 Dokumen Regulasi	200 %	2 Dokumen Regulasi	8 Dokumen Regulasi	400 %
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%	2 hari	2 hari	100%
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100 %
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	3 persil	3 Persil	100 %	30 persil	68 Persil	226 %
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	85%	100%	117 %	87%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	12 Usulan	24 Usulan	200%	13 Usulan	14 Usulan	107%
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12,60%	11.33%	89.92 %	13,68%	12,34%	90,20 %
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Kabupaten/ Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	100%	100%	91,66%	98,50%	107,4%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Kabupaten /Kota yang menindaki anjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggung jawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PERSENTASE CAPAIAN			118,87%			124.89%		

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra.

Perbandingan Realisasi kinerja pada Tahun 2022 dengan Target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 rata - rata sudah tercapai. Dari 20 Indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022, hanya satu Indikator Kinerja yang tidak tercapai yaitu Jumlah Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi, dan 19 Indikator lainnya sudah tercapai. Bahkan ada Indikator Kinerja yang melebihi target akhir kinerja Renstra yaitu Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra BPKAD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,05%	125,2 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	14,21 %	142,1%
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	8 Dokumen Regulasi	400 %
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	30 persil	68 Persil	226 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	87%	100%	100%
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	13 Usulan	14 Usulan	107%
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	13,68%	12.34%	90,20 %
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	100%	98,50%	107,4%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab.Kota	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja yaitu :

- a. Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- c. Adanya komitmen Bersama dalam mencapai Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah di tanda tangani

Adapun penyebab belum tercapainya Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah adanya beberapa lokasi Aset di beberapa Kabupaten/Kota yang akan diinventarisasi sulit diakses.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada bagian ini akan dijabarkan bagaimana efisiensi penggunaan Sumber Daya, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian kinerja yang lebih baik.

Dari Tujuh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 telah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya dengan rata-rata tingkat efisiensi 17,72%. Ada empat kegiatan yang diatas rata-rata tingkat efisiensi, yaitu kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 31.08%, kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan tingkat efisiensi 26.59%, Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 26.27% dan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 26.27%.

Disamping itu ada tiga kegiatan yang dibawah rata-rata tingkat efisiensi yaitu kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan tingkat efisiensi 17,27%, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 7.81%, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tingkat efisiensi 15,01%,

Realisasi Kinerja, Anggaran dan tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah sesuai dengan target Kinerja, mendekati tingkat efisiensi yang baik, untuk Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja rata-rata sudah mencapai 100%, Meskipun ada 1 Indikator Kinerja yang capaiannya kurang dari 100% yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi hanya mencapai 90,20%. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 3.1.5. berikut :

Tabel 3.1.5
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	660.681.150	455.361.335	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	68.92%	31.08%
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	3.445.917.535,00	2.850.841.490,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	82.73%	17.27%
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	2 hari	2 hari	100%	225.933.435,00	165.860.194,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	73,41%	26.59%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	852.971.381,00	786.364.769,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	92,19%	7.81%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2022	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91.66%	98.50%	107.4%	700.908.781,00	516.764.288,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	73,73%	26.27%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	700.908.781,00	516.764.288,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	73,73%	26.27%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	13.68%	12,34%	90,20%	2.093.181.304,00	1.778.966.249,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	84,99%	15.01%

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 rata-rata telah menunjukkan capaian 100% dan hanya satu Indikator Kinerja yang dibawah 100% yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi dengan tingkat capaian 90.20 %

Dari 25 SubKegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ada Satu SubKegiatan yang Realisasinya dibawah 50% yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, serta ada 24 Sub Kegiatan atau 96% Realisasi Anggarannya diatas 50%.

Uraian realisasi anggaran Subkegiatan yang menunjang indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1.6 berikut :

Tabel 3.1.6
Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realiasasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	3.445.917.535,00	2.850.841.490,00	82,73
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	660.681.150,00	455.361.335,00	68,92
						Penyusunan Standar Harga	298.436.000,00	282.542.280,00	94,67
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,74%	129 %	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.270.706.500,00	1.189.529.913,00	93,61
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	16,68 %	166 %				
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.297.804.985,00	1.101.444.834,00	84,87

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	8 Dokumen Regulasi	400 %	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	503.344.550,00	250.525.625,00	49,77
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	242.147.312,00	179.421.108,00	74,10
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	225.933.435,00	165.860.194,00	73,41
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100%	100%				

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	424.674.270,00	408.400.324,00	96,17
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	167.595.256,00	159.361.268,00	95,09
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	125.127.230,00	104.237.048,00	83,30
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	135.574.625,00	114.366.129,00	84,36

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	30 persil	68 Persil	226 %	Pengamanan Barang Milik Daerah	791.606.800,00	698.386.220,00	88,22
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	85%	100%	117 %	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.461.640,00	13.057.295,00	79,32
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	12 Usulan	24 Usulan	200%	Penilaian Barang Milik Daerah	157.177.450,00	97.812.450,00	62,23
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	96.131.000,00	88.586.350,00	92,15
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12,60%	11.33%	90.20 %	Inventarisasi Barang Milik Daerah	240.154.555,00	186.046.192,00	77,47
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	85.734.806,00	78.117.356,00	91,12
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	128.999.225,00	114.200.700,00	88,53

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realiasasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	170.480.593,00	147.136.906,00	86,31
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	107.999.235,00	73.080.500,00	67,67
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100 %	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	255.777.231,00	197.489.897,00	77,21
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	98,50%	107,4%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	177.721.605,00	115.148.189,00	64,79

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realiasasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	95.667.565,00	88.324.952,00	92,32
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	171.742.380,00	115.801.250,00	67,43

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau memperoleh Anggaran sebesar Rp. 2.153.079.478.959. Anggaran tersebut terdistribusi dalam (3) Program, (14) kegiatan, dan dari 3 Program dan 43 Sub Kegiatan yang dijalankan selama Tahun 2022 Jumlah realisasi adalah Rp. 2.128.909.403.811. Dari 43 Sub Kegiatan ada 1 Sub Kegiatan dengan realisasi tertinggi sebesar 98,88% yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi, dan ada 15 Sub Kegiatan yang Realisasi diatasnya 90 persen, Ada 25 Sub Kegiatan Realisasinya dibawah 50 %, 26 Sub Kegiatan dengan Realisasinya diantara 50% sampai dengan 90 %.

Jika dilihat secara akumulasi menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap realisasi anggaran BPKAD Provinsi Riau pada Tahun 2022. Bagaimana lebih jelasnya Realisasi Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.728.307.397,00	29.864.994.087,00	94,13	97,33
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.460.036.424,00	20.119.343.792,00	98,33	98,33
1	5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.460.036.424,00	20.119.343.792,00	98,33	98,33
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.728.226,00	14.916.800,00	75,61	90,73
2	5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.728.226,00	14.916.800,00	75,61	90,73
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.989.724,00	120.039.480,00	71,88	100,00
3	5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166.989.724,00	120.039.480,00	71,88	100,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.124.850.089,00	1.454.049.508,00	68,43	85,36
4	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	57.041.120,00	56.194.305,00	98,52	100,00
5	5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	605.579.388,00	353.695.650,00	58,41	100,00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		(%)
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
6	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.674.000,00	227.344.000,00	94,86	100,00
7	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	353.367.581,00	258.999.454,00	73,29	99,69
8	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	869.188.000,00	557.816.099,00	64,18	64,34
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.491.688.293,00	2.357.740.226,00	94,62	99,10
9	5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.491.688.293,00	2.357.740.226,00	94,62	99,10
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.764.945.806,00	4.348.024.677,00	91,25	98,46
10	5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.750.000,00	39.992.000,00	95,79	96,13
11	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	721.825.292,00	607.612.560,00	84,18	92,93
12	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.001.370.514,00	3.700.420.117,00	92,48	99,49
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.700.068.835,00	1.450.879.604,00	85,34	94,20

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
13	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	412.320.000,00	353.044.916,00	85,62	96,35
14	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	277.580.000,00	164.480.000,00	59,25	70,61
15	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.010.168.835,00	933.354.688,00	92,40	99,80
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.119.257.990.258,00	2.097.265.443.475,62	98,96	99,50
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.445.917.535,00	2.850.841.490,00	82,73	93,36
16	5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	374.061.500,00	309.341.118,00	82,70	97,03
17	5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.270.706.500,00	1.189.529.913,00	93,61	100,00
18	5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.297.804.985,00	1.101.444.834,00	84,87	98,52

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
19	5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	503.344.550,00	250.525.625,00	49,77	60,58
II	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	700.908.781,00	516.764.288,00	73,73	95,75
20	5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	255.777.231,00	197.489.897,00	77,21	100,00
21	5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	177.721.605,00	115.148.189,00	64,79	84,14
22	5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	95.667.565,00	88.324.952,00	92,32	100,00
23	5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	171.742.380,00	115.801.250,00	67,43	99,06

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
III	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	468.080.747,00	345.281.302,00	73,77	98,92
24	5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	225.933.435,00	165.860.194,00	73,41	100,00
25	5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	242.147.312,00	179.421.108,00	74,10	97,91
IV	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	852.971.381,00	786.364.769,00	92,19	99,96
26	5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	167.595.256,00	159.361.268,00	95,09	100,00
27	5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	424.674.270,00	408.400.324,00	96,17	100,00
28	5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	125.127.230,00	104.237.048,00	83,30	99,75

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
29	5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	135.574.625,00	114.366.129,00	84,36	100,00
V	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.113.129.430.664,00	2.092.310.830.291,62	99,01	99,51
30	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	427.562.676.900,00	417.024.623.852,00	97,54	100,00
31	5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	19.726.571.303,00	9.446.023.980,00	47,88	47,88
32	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1.665.840.182.461,00	1.665.840.182.459,62	100,00	100,00
VI	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	660.681.150,00	455.361.335,00	68,92	79,93
33	5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	660.681.150,00	455.361.335,00	68,92	79,93
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.093.181.304,00	1.778.966.249,00	84,99	94,01
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.093.181.304,00	1.778.966.249,00	84,99	94,01
34	5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	298.436.000,00	282.542.280,00	94,67	99,49

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		(%)
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
35	5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	128.999.225,00	114.200.700,00	88,53	100,00
36	5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	170.480.593,00	147.136.906,00	86,31	98,42
37	5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	240.154.555,00	186.046.192,00	77,47	97,99
38	5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	791.606.800,00	698.386.220,00	88,22	91,40
39	5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	157.177.450,00	97.812.450,00	62,23	73,75
40	5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.461.640,00	13.057.295,00	79,32	100,00
41	5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	96.131.000,00	88.586.350,00	92,15	99,28
42	5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	85.734.806,00	78.117.356,00	91,12	95,54
43	5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	107.999.235,00	73.080.500,00	67,67	97,62
TOTAL		2.153.079.478.959,00	2.128.909.403.811,62	98,88	99,46

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama kurun waktu Tahun 2022 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum Capaian Kinerja yang melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja diatas 100% dan Realisasi Anggaran sebesar 98,88%. Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
- c. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- d. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain Sulitnya akses menuju beberapa lokasi asset yang akan diinventarisasi.

4.2 Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan pembahasan berikut adalah langkah – langkah strategis yang dapat diambil BPKAD Provinsi Riau dalam meningkatkan capaian kinerja, yaitu :

- a. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah.

- b. Melakukan Rapat Evaluasi setiap bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian realisasi kinerja dan keuangan yang sudah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja.
- c. Memberikan *reward dan punishment* kepada pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target, pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) dan pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.
- d. Menggunakan Informasi yang disajikan untuk penilaian kinerja, artinya informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan sebagai dasar pemberian *reward dan punishment* yang bersifat menyeluruh untuk seluruh pegawai.



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**

Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru

e-mail : plannerbpkad@gmail.com

[www. bpkad.riau.go.id](http://www.bpkad.riau.go.id)